

**PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG INDUSTRI
DI KABUPATEN BANDUNG**

**INFLUENCE OF CONTROL ON THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT
IN THE STATE OF CAPITAL INVESTMENT AND INTEGRATED
SERVICES OF ONE INDUSTRIAL DOOR
IN KABUPATEN BANDUNG**

Nia Pusparini

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Bandung Belum efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskannya sebagai berikut “Seberapa Besar Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Kabupaten Bandung. Untuk menganalisis masalah yang diteliti, penulis mengajukan teori Pengendalian dari Hasibuan berdasarkan Cara-Cara Pengendalian”, yaitu Pengendalian langsung, Pengendalian tidak langsung, dan Pengendalian berdasarkan kekecualian. Sedangkan teori Efektivitas digunakan dari Goggin et.al dalam Soemaryadi berdasarkan tiga dimensi yaitu Prosedural, Tujuan/Hasil, dan Monitoring dan Evaluasi. Adapun hipotesis yang diajukan: “Besarnya Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung ditentukan oleh dimensi pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung, dan pengendalian berdasarkan kekecualian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi angket, wawancara, dan observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan “*simple random sampling*” dengan sasarannya adalah aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Pengusaha Kabupaten Bandung. Adapun Teknik analisa data dan pengujian hipotesis menggunakan Koefisien Rank Spearman, Uji Signifikan, dan Koefisien Determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Kabupaten Bandung. Hasil ini dibuktikan dengan variabel pengaruh Pengendalian berdasarkan “Cara-Cara Pengendalian” secara keseluruhan berada pada kondisi “cukup baik”. Demikian juga Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Kabupaten Bandung.

Dengan demikian hasil uji statistik memperlihatkan korelasi (pengaruh) kedua variabel X dan Y adalah “kuat”. Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa hipotesis teruji secara empirik.

Kata Kunci: Pengendalian, Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri

ABSTRACT

The background of this research problem is the Bandung Regency Domestic Investment has not been effective. Based on these problems, the researchers formulated it as follows "How Big is the Effect of Control on the Effectiveness of Domestic Investment in the Investment Office and One-Stop Integrated Services in Bandung Regency Industry Sector. To analyze the problem under study, the authors propose the theory of Control from Hasibuan based on Methods of Control ", namely direct control, indirect control, and control based on exceptions. While the effectiveness theory is used from Goggin et.al in Soemaryadi based on three dimensions namely Procedural, Objectives / Results, and Monitoring and Evaluation. The hypothesis is proposed: "The Amount of Effect of Control on the Effectiveness of Domestic Investment in the One-Stop Investment and Integrated Services Office in Industry in Bandung Regency is determined by the dimensions of direct control, indirect control, and control based on exceptions.

The research method used is the Descriptive Analysis method. The data collection techniques through literature study and field studies which include questionnaires, interviews, and observations. The sampling technique uses "simple random sampling" with the target being the apparatus of the Investment Office and the One Stop Integrated Service (PMPTSP) and Entrepreneurs in Bandung Regency. The data analysis technique and hypothesis testing use the Spearman Rank Coefficient, Significant Test, and the Determination Coefficient. The results showed that Control had a positive and significant effect on the Effectiveness of Domestic Investment in the One-Stop Investment and Integrated Services Office in the Industrial District of Bandung. This result is evidenced by the variable influence of Control based on "Methods of Control" as a whole is in a "pretty good" condition. Likewise, the Effectiveness of Domestic Investment in the Office of Investment and Integrated Services One Door Industry Field in Bandung Regency.

Thus the results of statistical tests show the correlation (influence) of the two variables X and Y are "strong". This means that H_0 is rejected and H_1 is accepted, which means that the hypothesis is empirically tested.

Keywords: Control, Effectiveness of Domestic Investment

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kajian

Perkembangan pasar modal saat ini semakin pesat yang didukung dengan semakin mudahnya dalam melakukan transaksi jual-beli saham, yaitu melalui sistem *online trading* yang disediakan oleh berbagai sekuritas, yang memungkinkan para investor maupun *trader* untuk melakukan transaksi secara *online* dari akun yang telah terdaftar. Perbedaan utama antara *investor* dan *trader* terletak pada jangka waktu investasinya (*investment timehorizon*), istilah investor untuk jangka panjang dan *trader* untuk jangka pendek. Saat ini terdapat sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM.

Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam Negeri maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang pro aktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2012, Bab III, Pasal Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi

kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam Negeri maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang pro aktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Kabupaten Bandung dilihat dari sisi ekonomi memiliki struktur perekonomian industri. Hal ini dapat dilihat dari komposisi PDRB berdasarkan klasifikasi kontribusi terbesar sektor sekunder lebih tinggi dari sektor primer dan tersier. Kondisi ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Bandung yang berada ditengah-tengah daerah yang mempunyai potensi pasar yang cukup besar dan potensi sumber daya manusia dalam bentuk ketersediaan tenaga kerja yang dapat menunjang terhadap pertumbuhan sektor sekunder. Potensi lainnya posisi geografis yang dapat mempercepat proses pemasaran produk yang dihasilkan yaitu dengan tersedianya infrastruktur berupa jalan tol sehingga arus barang dan jasa baik yang masuk maupun yang keluar. Kabupaten Bandung relatif dapat lebih cepat dibanding dengan daerah-daerah lainnya, sehingga Kabupaten Bandung sampai saat ini masih menjadi salah satu daerah tujuan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Susunan Pemerintah daerah kabupaten Bandung Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Di Kabupaten Bandung dijelaskan bahwa penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Investasi yang tertanam di Kabupaten Bandung selama periode 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan (terutama dari tahun 2014 ke tahun 2015). Pada tahun 2015, yang berasal dari perusahaan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp. 5.964.221.707.548,-. Berarti dalam periode ini terjadi lonjakan nilai Investasi di Kabupaten Bandung, hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa pada periode ini Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang sangat menjanjikan untuk melakukan Investasi.

Untuk mendukung keberhasilan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 pada misi ke 5 (lima) yaitu menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontributor sektor ekonomi terhadap pembangunan Daerah terhadap sasaran meningkatnya kemudahan investasi.

Pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021 menargetkan Nilai Investasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 67.000.000.000.000,-. hal ini mengingat perkembangan investasi erat kaitannya dengan pengaruh perkembangan investasi itu sendiri sehingga target pada tahun 2016 masih tetap sama seperti target tahun lalu dengan pertimbangan jumlah nilai investasi yang tidak terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan besar akan tetapi termasuk juga investasi modal kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Realisasi investasi pada tahun 2016 tercatat investasi modal pada bidang industri mencapai 8 triliun lebih dengan 2.307 proyek, menjangkit sekitar 67 ribu tenaga kerja. Keberhasilan investasi 2016 di bidang usaha cenderung didominasi wilayah Majalaya, Solokanjeruk,

Dayeuhkolot, Margaasih dan Pameungpeuk, perkembangan realisasi investasi pada triwulan I tahun 2017 berdasarkan ijin usaha, mencapai 1,6 triliun dengan melibatkan 630 proyek dan menampung 618 tenaga kerja.

Pada penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal, bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Bandung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Dinas ini sebagai pengembangan dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung, sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dalam Surat Peraturan Bupati No. 88 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu Menyusun dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang meliputi Promosi dan Penggalan Potensi Penanaman Modal, Pengendalian, Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Bandung, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung lima tahun kedepan 2016-2021 yaitu "Memanfaatkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.13 Tahun 2014 Pasal 15 dijelaskan bahwa :

- a. Setiap perusahaan penanam modal wajib menyampaikan kegiatan secara berkala kepada Kepala Badan.
- b. Kewajiban Penyampaian dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah tersebut sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 25/2007 tentang penanaman modal dan peraturan Kepala BKPM RI Nomor 17/2015 tentang pedoman tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dimana setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan kegiatan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Di Kabupaten Bandung pasal 1 disebutkan bahwa, Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menghimbau kepada para investor PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) untuk mengisi Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara lengkap. LKPM tersebut bisa dijadikan bahan informasi yang sangat penting, karena akan terungkap permasalahan yang dihadapi para investor khususnya yang menyangkut masalah perizinan, pembebasan lahan atau masalah ketenagakerjaan. Selain permasalahan, dalam LKPM akan terungkap pula

keterangan perusahaan seperti nama, izin usaha, bidang usaha, lokasi proyek serta alamat korespondensi. Hal lain yang harus ditulis dalam LKPM, diantaranya realisasi investasi, penggunaan tenaga kerja, produksi dan pemasaran per tahun, serta kewajiban perusahaan yang menyangkut tanggung jawab sosial, kewajiban pengelolaan lingkungan, kemitraan dan pelatihan tenaga kerja.

Hasil observasi peneliti ditemukan data kegiatan penanaman modal tahun 2016 s.d 2017 bahwa penanaman Modal dalam Negeri Bidang Industri dari 123 pemohon menjadi 72 buah pemohon dan dari 141 pemohon menjadi 93 buah pemohon.

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri di bidang industri setiap tahunnya belum efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 13 Tahun 2014 Pasal 15.

Dari masalah tersebut di atas, peneliti menemukan indikasi-indikasi lainnya yang memperlihatkan belum efektifnya izin penanaman modal bidang industri sebagai berikut:

1. Tidak adanya perbaikan sistem administrasi pelaporan
2. Masih terdapat perusahaan belum memahami cara pengisian LKPM
3. Realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal belum sesuai dengan target
4. Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dilaporkan secara berkala
5. Kurang tegasnya pemberian sanksi pada perusahaan-perusahaan yang melanggar

Dari permasalahan di atas, banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun peneliti mencoba menerapkan konsep pengendalian, karena pengendalian selain mengandung arti pengawasan juga di dalamnya terdapat tindakan korektif atau perbaikan. Dengan demikian diharapkan melalui pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian berdasarkan kekecualian

dapat mengoptimalkan izin Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang industri melalui dimensi prosedural, tujuan/hasil, serta monitoring dan evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 13 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah : “ **Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disajikan di atas, peneliti merumuskannya ke dalam pernyataan penelitian (*problem statement*) yaitu untuk memberikan arah dan analisis di dalam penelitian ini, yaitu : “Seberapa besar Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung”.

1.2. Tujuan Kajian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penanaman modal terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut George. R Terry yang dikutip oleh Hasibuan (2007:246), sebagai berikut : “Pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar”.

Selanjutnya Koonz, mengemukakan pendapat yang disadur oleh Hasibuan (2007:245): “Pengendalian

adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan”. Demikian pula yang disampaikan Strong sebagaimana dikutip oleh Hasibuan (2007:245), mengemukakan definisi pengendalian sebagai berikut ; “Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kesimpulan pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Jadi jelas pengendalian merupakan proses pelaksanaan kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana, instruksi, pedoman, patokan, peraturan, atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan perbaikan (korektif) dapat dilakukan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan atau deviasi supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Jadi kontrol dilakukan sejak proses dimulai, sampai pengukuran hasil yang akan dicapai, dan pengendalian ini diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen yaitu *Men, Money, Methods, Materials, Mechines and Market* atau (6M) dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Setiap tugas yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin, harus mampu mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu para pemimpin harus dapat mengatur teknik atau cara-cara untuk melaksanakan pengendalian. Teknik atau cara pengendalian menurut Hasibuan (2006 : 249-251) sebagai berikut :

1. Pengendalian langsung, adalah pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang pemimpin, untuk memeriksa apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan yang dikehendaknya.
2. Pengendalian tidak langsung, adalah pengendalian jarak jauh artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan, tulisan, tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Pengendalian berdasarkan kekecualian, adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil standar yang di harapkan.

Dengan menetapkan cara-cara pengendalian sebagai landasan teoritis dalam penelitian, diharapkan dapat terjadi pembagian tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya. Dengan demikian pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar atau rencana.

Konsep pengendalian tersebut di atas, peneliti gunakan untuk menganalisa efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung Agar pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan efektif, mengacu pada dimensi-dimensi seperti yang dikemukakan oleh Goggin, et.al dalam Soemaryadi (2005:111-113) yakni sebagai berikut:

1. *Prosedural Compliance* adalah semua aktifitas implemansi yang dijalankan oleh implementor (Pelaksana) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan secara tegas dan

otoritatif dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

2. Tujuan atau hasil (*Result*) yaitu menyangkut tujuan dan persoalan dasar (*Substansial*) yang hendak dipecahkan melalui kebijaksanaan (*Problem solving oriented*)
3. Perlu adanya tindakan-tindakan pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi sebagai upaya untuk memantau secara berkala agar efektivitas berjalan tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan, karena dapat melakukan perbaikan sesegera mungkin. Upaya ini dapat dilakukan secara langsung yaitu melalui laporan-laporan atau catatan tertulis.

Berdasarkan ketiga pengukuran dimensi tersebut di atas, dengan demikian dalam melaksanakan efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung yang paling utama adalah tercapainya program tersebut, tercermin dari adanya prosedural (*compliance*), tujuan/hasil (*result*), dan pemantauan (*monitoring*).

Bertitik tolak dari kerangka pikir, selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis : "Besarnya Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung) ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Pengendalian Langsung, Pengendalian Tidak Langsung dan Pengendalian Berdasarkan Kekecualian".

III. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi (*Explanatory Research*) dimana data informasi dikumpulkan dari populasi, hasilnya dikumpulkan kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengukur pengaruh

dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Metode ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, sebagaimana dikemukakan oleh Singarimbun (2001:

21) yaitu bahwa "Apabila peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka dinamakan penelitian penjelasan (*explanatory research*)".

IV. PEMBAHASAN

Untuk mengetahui gambaran tentang kondisi cara-cara pengendalian dilakukan analisis terhadap aplikasi konsep Hasibuan (2007: 245) sesuai dengan konsep pengendalian yang mengacu pada pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung. Sedangkan konsep lainnya dan pengendalian berdasarkan kekecualian dihubungkan berdasarkan tiga standar efektivitas, yaitu kualitas, prosedural, tujuan/hasil, dan pemantauan (*moniting*) dan evaluasi.

Berikut ini akan penulis ilustrasikan berdasarkan hasil wawancara atas penggunaan konsep cara-cara pengendalian dalam efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri (PMPTSP) Di Kabupaten Bandung".

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa Peran aparat dalam memperlancar tugasnya perlu melakukan pemeriksaan penanaman modal dalam rangka pemerataan kepemilikan izin penanaman modal di Kabupaten Bandung guna terselenggara dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa Peran aparat dalam memperlancar tugasnya perlu melakukan pemeriksaan penanaman modal guna memenuhi kebutuhan berbisnis industri bagi pengusaha industri secara profesional sehingga proses administrasinya berjalan

dengan lancar melalui usaha penanaman modal bidang industri sehingga masyarakat pengusaha dapat memberdayakan potensi ekonomi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan dimensi "pengendalian tidak langsung" ini penulis mengajukan 3 (tiga) indikator yang hasil perhitungan dari sebaran angket dinilai oleh para responden adalah "Cukup".

Berdasarkan dimensi "pengendalian tidak langsung" ini penulis mengajukan 3 (tiga) indikator yang hasil perhitungan dari sebaran angket dinilai oleh para responden adalah "Cukup".

Dalam dimensi "pengendalian berdasarkan kekecualian" penulis mengajukan 3 (tiga) indikator yang secara keseluruhan hasil sebaran angket berada pada perolehan hasil pada interval penilaian "Cukup". Kekecualian" dinilai oleh para responden adalah "Cukup".

Dengan demikian dari cara-cara pengendalian secara keseluruhan berada pada kondisi cukup, artinya bahwa secara keseluruhan cara-caraa pengendalian belum seluruhnya dapat dilaksanakan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung".

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa proses peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri dilaksanakan oleh Kepala Dinas PMPTSP Bidang Industri Kabupaten Bandung pada pelaksanaannya berdasarkan efektivitas organisasi melalui yaitu prosedural, tujuan/hasil, serta monitoring dan evaluasi dengan melakukan pengujian pada 9 (sembilan) indikator yang diaplikasikan ke dalam jawaban responden.

Pada dimensi pertama ini penulis mengajukan 3 (tiga) indikator diperoleh hasil berada pada interval penilaian "Cukup", sehingga dapat disimpulkan bahwa "Efektivitas" pada dimensi "Prosedural" dinilai oleh para responden adalah "Cukup".

Dalam dimensi kedua ini penulis mengajukan 3 (tiga) indikator melalui perhitungan pengolahan data diperoleh hasilnya berada pada interval penilaian “Cukup”, sehingga dapat disimpulkan bahwa “Efektivitas “pada dimensi “Tujuan/Hasil” dinilai oleh para responden adalah “Cukup”.

Dalam dimensi “Monitoring dan Evaluasi” ini penulis mengajukan 3 (tiga) indikator dimana hasil perhitungan pengolahan data diperoleh hasilnya berada pada interval penilaian Cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa “Efektivitas Penanaman Modal dalam Negeri di Kabupaten Bandung” pada dimensi “Monitoring dan Evaluasi” dinilai oleh para responden adalah “Cukup”.

Dari hasil perhitungan statistik terlihat bahwa korelasi atau hubungan antara variabel “Pengendalian” dengan variabel “Efektivitas” Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Bandung adalah sebesar 0,325. Hal ini memperlihatkan korelasi diantara dua variabel tersebut adalah kuat dan searah. Diperkuat pula dari perhitungan Koefisien determinasi (besarnya pengaruh) menunjukkan bahwa pengaruh variabel “Pengendalian” hanya memberikan variasi sebesar 60,35 % terhadap “Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Bandung”. Hal tersebut memperlihatkan ada sebesar 39,65 % faktor-faktor lain yang mempengaruhi selain “Pengendalian” yang tidak diteliti. Adapun faktor lainnya yang tidak diteliti adalah “Koordinasi dan implementasi kebijakan”.

Hasilnya digambarkan atau diilustrasikan dalam gambar distribusi normal (distribusi t) atau berbentuk kurva distribusi t, artinya bahwa hipotesis yang menyatakan adanya Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Bandung yang ditentukan oleh dimensi Pengendalian Langsung, Pengendalian Tidak langsung, dan Pengendalian Berdasarkan Kekecualian

dapat diterima secara empirik atau H_1 diterima H_0 ditolak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum diksanakannya cara-cara pengendalian melalui dimensi pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian berdasarkan kekecualian akan berpengaruh terhadap tidak efektifnya Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung”.

V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai pengendalian yang diaplikasikan dengan menggunakan beberapa konsep cara-cara pengendalian melalui pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung, dan pengendalian berdasarkan kekecualian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan “Besarnya pengaruh Pengendalian melalui dimensi pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung, dan pengendalian berdasarkan kekecualian secara keseluruhan berdasarkan interval penilaian berada pada kondisi cukup baik”. Demikian pula “Efektivitas Penanaman Modal dalam Negeri Di Kabupaten Bandung secara keseluruhan berdasarkan hasil interval penilaian berada pada kondisi cukup baik.
2. Cara-cara Pengendalian berpengaruh kuat dan signifikan terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian hipotesis statistik yang diajukan teruji secara empirik. Jadi dalam penelitian ini pengaruh Pengendalian cukup tinggi (pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung, dan pengendalian berdasarkan

kekecualian) dimana berpengaruh terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Sisanya terdapat faktor lainnya yang tidak diteliti selain “pengendalian” adalah “implementasi kebijakan” dan “koordinasi”.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran-saran yang peneliti ajukan untuk pengembangan ilmu serta saran yang bersifat operasional berikut ini:

5.1.1 Saran Untuk Pengembangan Ilmu (Akademis) :

Khususnya dalam peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Bandung masih menyisakan faktor lain untuk penelitian di bidang yang berbeda di luar pengendalian. Untuk itu, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan lain, sehingga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penyelenggaraan Ilmu Pemerintahan dengan temuan konsep yang komprehensif.

5.1.2 Saran Praktis (untuk pengendalian)

1. Disarankan sebaiknya Kepala Dinas PMPTSP melakukan inspeksi secara langsung terhadap para investor penanaman modal dalam negeri tidak menugaskan staff pelayanan agar dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi investor penanaman modal dalam negeri.
2. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melengkapi sarana komputerisasi sesuai kebutuhan untuk pelayanan investasi penanaman modal dalam negeri, agar pelayanan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang industri lebih optimal.
3. Sebaiknya aparat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu pada saat menyampaikan laporan secara tertulis tidak dilakukan berdasarkan tri wulan tetapi sebaiknya dilakukan setiap bulan agar hasilnya sesuai dengan target yang diharapkan.

4. Disarankan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih tegas memberikan sanksi kepada para investor yang tidak menyampaikan laporan penanaman modal.
5. Sebaiknya Aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan informasi kepada para investor secara detail mengenai pengisian Laporan Penanaman Modal melalui online

DAFTAR PUSTAKA

A) Buku-Buku:

- Gibson, Ivancevich, & James, Donnely. 1996. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jilid Satu. Terjemahan : Nunuk Ardiani. Bina Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007), *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Keenam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ivancevich, John M., et.al.2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jilid I. Jakarta: PN Erlangga.
- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Stoner, Freeman, R. Edward. 1996. *Manajemen*. (Alih Bahasa Sindoro). PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: PN Citra Utama,

B) Dokumen-Dpkumen:

- Republik, Indonesia, 2007 Undang-undang Nomor 5 tahun 2007 tentang *penanaman modal*.

- Propinsi Jawa Barat. 2017. Peraturan Kepala BKPM No.17 Tahun 2017 tentang *Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*.
- _____. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang *Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Di Kabupaten Bandung*.
- _____. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang *Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung*.